

SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN TAKALAR

Nasriah Akil *)

Abstract : Development as a process of social change to the order of a society which is considered better is not a new phenomenon, because the process involves the construction of improvements. In other words, development is a process of changes and its planned growth into improvements oriented toward modernization, nation building and socio-economic progress.

Keywords: fishing communities Empowerment System

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan nasional, pemerintah tetap mempunyai peranan sentral, baik sebagai perencana, penggerak, dan pengendali pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional adalah faktor kemampuan aparatur pemerintah (pusat dan kabupaten). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan daerah kabupaten Takalar merupakan bagian integral dari pembangunan daerah propinsi Sulawesi Selatan dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan Program pembangunan, tentunya pemerintah kabupaten senantiasa dihadapkan pada berbagai macam permasalahan, baik dalam bentuk pelayanan pada segenap lapisan masyarakat dan sekaligus melakukan pengaturan terhadap segenap aktivitas seluruh komponen warga masyarakat, maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan pendanaan dan biaya dalam menjalankan berbagai program pembangunan atau program pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang mutlak harus diberikan khususnya pada masyarakat Takalar adalah menyelenggarakan program pembangunan diberbagai bidang, khususnya pada bidang pemamfaatan sumber daya laut, dan tentunya

dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat nelayan, dengan tujuan mengembangkan potensi perikanan kabupaten Takalar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan itu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Program pembangunann khususnya dalam bidang perikanan.

Peranan aparatur pemerintah kabupaten dalam hal memberdayakan masyarakat nelayan merupakan tuntutan yang mutlak harus dilaksanakan sebagai salah satu program pembangunan dan harus menduduki tempat yang strategis terutama di kecamatan Polombangkén Utara yang mempunyai potensi Perikanan yang cukup besar.

Aparatur Pemerintah dan Peranannya dalam Pembangunan

Yamin dalang Ateng (1976: 3) mengemukakan bahwa pemerintah adalah lembaga atau kumpulan lembaga, dimana suatu masyarakat yang merdeka membuat dan mengerjakan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diperlukan untuk memungkinkan manusia hidup dalam suatu negara sosial, atau yang dibuat manusia yang memebentuk masyarakat itu, oleh mereka yang mempunyai kekuasaan atau pemerintah yang mengatur mereka. Pemerintah adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan dari masyarakat.

Aparat yang menjalankan pemerintahan pada hakekatnya adalah pegawai negeri, pegawai negara, pejabat negara, adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara, berarti segala pelaksanaan dari semua tugas negara yang dibebankan padanya, dan sebagai abdi masyarakat berarti segenap pelaksanaan tugas tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan segenap lapisan masyarakat, sesuai bidang tugasnya masing-masing dan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif (Sadly, 1993: 11).

Dalam tugasnya sehari-hari, pemerintah senantiasa dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam bentuk pelayanan pada segenap lapisan masyarakat dan sekaligus melakukan pengaturan terhadap segenap aktivitas warga masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan adalah menyelenggarakan program pembangunan diberbagai bidang yang dilakukan bersama-sama dan sebagai perwujudan partisipasi masyarakat. Peranan aparatur pemerintah merupakan tuntutan dari pembangunan dan menduduki tempat yang strategis terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti negara kita. Aparatur pemerintah yang bekerja dan mengabdikan pada organisasi pemerintahan, mulai dari organisasi pemerintahan pusat sampai organisasi pemerintahan yang terendah, menempati posisi yang strategis dalam pelaksanaan program pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu proses yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu ke suatu keadaan yang dianggap baik (Tjokoamidjojo, 1980: 222). Dalam pengertian tersebut, sebenarnya keadaan yang dianggap lebih baik merupakan tujuan dari usaha pembangunan dari setiap bangsa dan negara tertentu tidak selalu sama. Bagi bangsa Indonesia, tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan melalui pembangunan

nasionalnya adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bertitik tolak pada pandangan di atas, maka pembangunan sebagai orientasi dan proses usaha yang berencana harus dilihat sebagai rangkaian-rangkaian perubahan dan pertumbuhan yang bergerak maju, tidak saja bergantung pada pemerintah, tapi semua komponen pelaksana pembangunan, termasuk peran serta masyarakat yang menentukan berhasil tidaknya pembangunan.

Menurut Syamsi (1989:117) peranan pemerintah dalam program pembangunan meliputi lima hal, yaitu:

1. Sebagai motifator, dimana pemerintah beserta aparatnya, baik ditingkat pusat maupun kabupaten sampai di pedesaan harus mampu mendorong segenap lapisan masyarakat berperan secara aktif dalam program pembangunan.
2. Sebagai dinamisator, yaitu pemerintah harus bergerak dinamis dalam melaksanakan program pembangunan dan dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut dinamis, sehingga mudah digerakkan dalam pembangunan.
3. Sebagai katalisator, dalam arti bahwa pemerintah beserta aparatnya harus mampu memberikan contoh serta kecekatan gerak tanpa mengorbankan kualitas hasilnya.
4. Sebagai stabilisator, dimana pemerintah dan aparatnya harus mampu menciptakan kestabilan kegiatan pembangunan, tahan terhadap goncangan, baik dari luar maupun dari dalam masyarakat itu sendiri. Stabilisasi dalam hal ini meliputi bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. stabilitas merupakan prasarat mutlak bagi kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan.
5. Sebagai modernisator, dalam arti bahwa pemerintah dan seluruh aparatnya harus mengusahakan dinamika dalam masyarakat, mementingkan kepentingan masyarakat dan persamaan hak.

Dari berbagai pandangan menunjukkan bahwa program pemerintah sangat berkaitan erat dengan usaha pembangunan dan perubahan dari suatu masyarakat, sebab program pemerintah sesungguhnya merupakan suatu usaha pembaharuan dan pembangunan yang diarahkan pada kegiatan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi apabila tujuan pemerintah dalam pembangunan tetap mencerminkan tujuan masyarakat, maka tujuan pokok itu pada dasarnya adalah untuk kemajuan sosial ekonomi.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemerintah, karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dalam hubungannya dengan peranan pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten yang berhubungannya langsung dengan masyarakat bawah, dapat lebih mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri dan hasilnya dapat ditukar dengan pihak lain. Dalam hubungannya dengan program pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten, dimana pemerintah kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat bawah dapat lebih mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Masyarakat dan Masyarakat Nelayan

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris diidentikkan dengan *society* (Latin) "*socius*" yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata memang sesuai dengan kenyataan bahwa masyarakat itu tidak lain dari pada sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul.

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa: Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut adaptasi tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama.

Sejalan dengan itu M. Cholil Mansyur memberikan batasan sebagai berikut: Masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia dan dipersekutukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka.

Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya selalu dapat dipenuhi sendiri begitupun sebaliknya pada orang lain. Saling ketergantungan inilah yang kemudian melahirkan interaksi sosial.

Interaksi sosial dalam masyarakat dapat diketahui melalui adanya kontak sosial (*social contact*) dan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat. Adanya kontak sosial dan komunikasi itu sehingga masyarakat selalu kelihatan hidup penuh dengan kebersamaan. Pada dasarnya kehidupan bersama manusia senantiasa melakukan berbagai macam bentuk kegiatan yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan dan pengembangan kehidupannya untuk menjadi yang lebih baik. Untuk merealisasikan hal itu pada awalnya manusia (masyarakat) mengadakan pembagian pekerjaan yang mencakup diferensiasi kegiatan-kegiatan dalam pemenuhan kegiatan hidupnya. tentu saja hal itu berdasarkan pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki masing-masing anggota kelompok. Dengan demikian maka akan timbul adanya bentuk klarifikasi atau struktur sosial masyarakat yang beraneka ragam coraknya.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah darat,

sehingga memungkinkan laut sebagai lapangan mata pencaharian hidup bagi penduduknya, terutama yang bermukim di sekitar daerah pantai.

Sebelum lebih jauh membahas tentang masyarakat nelayan, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian tentang masyarakat nelayan sebagai berikut: Arisman, mengemukakan pengertian nelayan sebagai berikut: Nelayan adalah orang yang pekerjaannya/kegiatannya menangkap ikan dilaut, di sungai, di danau dan membudidayakan berbagai macam ikan tawar di empang, jadi nelayan tidak selamanya menangkap ikan di laut dan menggunakan perahu.

Pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan baik di laut, di sungai maupun di danau atau membudidayakan di tambak(empang).

Dari berbagai macam penjelasan di atas maka jika dikelompokkan menurut statusnya, terdapat dua kelompok nelayan:

Nelayan Modern yaitu nelayan yang mempergunakan teknologi modern dalam melakukan penangkapan ikan di laut, misalnya mempergunakan perahu bermotor yang mempunyai peralatan yang lengkap dan canggih yang tidak dimiliki oleh nelayan tradisional.

Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Pemberdayaan

Dari hasil penelitian yang didukung oleh pengamatan empiric terhadap aktifitas keseharian masyarakat nelayan, maka dapat dilihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, khususnya di desa Bugis kecamatan Polombangken Utara dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu: (1) Faktor positif atau faktor-faktor yang mendukung Program pemberdayaan masyarakat nelayan dan (2) Faktor Negatif atau faktor-faktor penghambat

program pemberdayaan masyarakat nelayan.

Adapun faktor-faktor yang mendukung program pemberdayaan masyarakat nelayan di desa Bugis kecamatan Polombangken Utara yaitu:

- a. Tingginya antusias masyarakat nelayan untuk diberdayakan atau dengan kata lain adanya kemauan dari masyarakat nelayan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang perikanan, hal ini dapat dilihat dari prosentase masyarakat nelayan yang pernah mengikuti penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, yang tentunya mengacu pada peningkatan taraf hidupnya.
- b. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat nelayan walaupun baru sebatas bantuan dana yang bersifat kredit dan penyuluhan tetap hal ini sangat berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat nelayan, khususnya dalam peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan. Hal ini dapat dilihat dengan tingginya prosentase masyarakat nelayan yang menyatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten sangat bermamfaat, dan tingginya prosentasi masyarakat nelayan yang menyatakan pengetahuan dan keterampilan mereka meningkat setelah mendapat bantuan dari pemerintah daerah khususnya bantuan penyuluhan dibidang perikanan.

Faktor Negatif

Dari hasil pengamatan yang didukung oleh berbagai fakta dan informasi bahwa ketidakberdayaan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, khususnya nelayan di desa Bugis kecamatan Polombangken Utara, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah kabupaten yang sedikit lebih condong kepada pembangunan dibidang pertanian, sehingga perhatian pada bidang perikanan kurang maksimal.
- b. Kurang optimalnya perhatian pemerintah kabupaten dalam memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan, baik yang berupa bantuan dana maupun bantuan alat perlengkapan, guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan.
- c. Belum adanya fasilitas yang memadai yang di sediakan oleh pemerintah kabupaten, seperti tempat pelelangan ikan yang memenuhi standar harga yang layak bagi masyarakat nelayan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka penulis dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut: Program pemerintah kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di kecamatan Polombangkene Utara kabupaten Takalar, dilihat dari program bimbingan dan penyuluhan dalam meningkatkan produksi perikanan masyarakat nelayan sudah dapat terealisasi, namun dapat dikategorikan belum optimal.

Program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan, dilihat dari mekanisme dan prosedur pelayanan dapat dikategorikan kurang memuaskan masyarakat nelayan, sedangkan organisasi/lembaga yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan, dapat dikategorikan cukup memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja organisasi pelayanan masyarakat sudah mulai peka terhadap kebutuhan masyarakat nelayan khususnya di Kecamatan Polombangkene Utara.

Saran-saran

Berdasarkan dari berbagai hasil pengamatan langsung di lapangan, selama penulis melakukan penelitian, dan mengacu pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah di lakukan, maka penulis kirannya dapat menyampaikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk semua pihak yang terkait, dalam hal yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat nelayan, sebagai berikut:

Dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, sebagai salah satu potensi yang besar, diharapkan pada pemerintah kabupaten mengusahakan adanya bantuan dan kebijakan yang berimbang antara sektor pertanian dan sektor perikanan. Dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan diperlukan adanya upaya serius pemerintah kabupaten dalam melindungi sumber daya perikanan yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Amirin, Tatang M, 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta, Rajawali Pers
- Arisman, 1992. *Perikanan laut*. Bandung, Pratama Angkasa
- Bayu, M, 2001. *Strategi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Lokal*. Mataram, Pemerbit UNRAM
- Bogdan, R dan Steven J. Tailor, 1993. *Dasar-Dsar Penelitian Kualitatif*. (Terjemahan
- A. Khozim Afandi), Surabaya, Usaha Nasional
- Cholil Mansyur. M, 1989. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya, Usaha Nasional,

- Gany, A Radi, 1992. *Mozaik Pembangunan (Sketsa dan Analisis)*. Jakarta, Prtatama Media Intim
- Hanafiah, AM, 1986. *Tata Niaga Hasil Perikanan*. Jakarta, UI Pers
- Hamid, Abu, 1987. *Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Kemaritimn di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang, UNHAS
- Hasanuddin, Basri, 1985. *Struktur Ekonomi Masyarakat Pantai*. Jakarta, S. Harapan
- Ibrahim, Jummi Muhammad, 1991. *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta, Dahara Prize
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerintahan*. Jakarta, CIDES
- Koentjaraningrat, 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, PT.Gramedia,
- Mattulada, 1997. *Masyarakat Pesisir Dilihat Dari Sudut Pandang Antropologi dan Sosiologi*. Ujung Pandang, Lephass
- Mukhlis, 1987. *Dimensi Sosial Kawasan Pantail*. Ujung Pandang. P3MP UNHAS
- Ndraha, Talizduhu, 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan*. Jakarta, Radar Jaya Offset
- Siagian, 1997. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta, PT. Gunung Sari
- Syamsi, Ibnu, 1989. *Pengambilan Keputusan*. Jakarta, Bina Aksara
- Syukur, H.M. Abdullah, 1984. *Pemerintah Daerah dan Pembangunan Nasional*. (Laporan Penelitian kerjasama Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat), Ujung Pandang, FISIP UNHAS
- Syurya, Hamka,. 2002. *Pengetahuan Kelautan Masyarakat Nelayan (Suatu Studi Etnokologi di Nusa Tenggara Barat)*. Mataram, Penerbit UNRAM

***) Penulis adalah Dosen STIM-LPI Makassar**